

PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Unun RizkaFajriati¹, Siti Maghfiroh², Sugiarto³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

*Email corresponding author: siti.maghfiroh@unsoed.ac.id

Abstrak

This research is a quantitative research with survey method. This research takes the title: "The Influence of Accounting Information Systems, Human Resource Competence and Internal Control on the Quality of Local Government Financial Reports", an empirical study in Kebumen Regency and Banyumas Regency. The purpose of this study was to determine the effect of Accounting Information Systems, Human Resources Competence and Internal Control on the Quality of Local Government Financial Reports.

The population in this study were OPD in Kebumen and Banyumas districts, each of which consisted of 17 (seventeen) districts. The number of respondents in this study were 102 respondents. The sampling technique used was purposive sampling method. Data was collected by distributing questionnaires to the finance department employees.

Data analysis was performed using the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) application. The results of data analysis in this study indicate that: (1) The accounting information system has a significant effect on the quality of local government financial reports. (2) The competence of human resources has a significant effect on the quality of local government financial reports. (3) Internal control does not affect the quality of local government financial reports. The implication of the conclusion above is that local governments in improving the quality of financial reports can pay attention to influencing factors, this study proves that the quality of local government financial reports is influenced by accounting information systems and human resource competencies.

Keywords: *Quality of Local Government Financial Reports, Accounting Information Systems, Human Resource Competence, Internal Control*

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah dapat menggambarkan kondisi suatu pemerintah dan merupakan salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya sehingga laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting. Tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang dapat bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya. Pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain: masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah sendiri (Warsito dkk, 2008 dalam Zuliarti, 2012). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur tentang prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan keuangan yang memiliki kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penilaian terhadap kualitas laporan keuangan daerah dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) pada setiap tahunnya. Badan pemeriksa keuangan dalam memberikan penilaiannya terdapat 4 jenis opini yaitu: opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), tidak memberikan pendapat (TMP). Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) memberikan indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut sudah berkualitas serta telah disajikan dan diungkapkan secara wajar.

Mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tidaklah mudah dalam mencapainya diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Beberapa kabupaten di Jawa Tengah untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian memerlukan waktu yang cukup lama, misalnya kabupaten Brebes dan kabupaten Tegal baru mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian di tahun 2019 dan selama tahun 2012 sampai 2018 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Namun ada juga kabupaten yang sudah mendapatkan opini wajar dari tahun 2012 sampai tahun 2019 seperti kabupaten Banyumas, kabupaten Jepara dan kabupaten Banjarnegara. Mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian diperlukan pembenahan, peningkatan sampai perbaikan di setiap tahunnya (<https://jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/>)

Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas merupakan pemerintahan daerah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan ketiga kalinya Kabupaten Kebumen mendapatkan opini WTP. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten kebumen tahun anggaran 2019, meskipun mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian BPK masih menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti penyetoran pendapatan redistribusi palkir pada Dinas Perhubungan yang dikelola KSU JP tidak sesuai perjanjian dan kurang setor sebesar Rp348,74 juta dan adanya pembayaran PBB atas tanah dan bangunan milik Pemda Kebumen sebesar Rp30,43 juta tidak tepat. Selain Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas juga mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian, namun masih ada catatan atau temuan-temuan dari BPK terutama mengenai aset yang harus diperbaiki lagi di tahun berikutnya oleh Pemda Kabupaten Banyumas (<https://suarabanyumas.com/luar-biasa-10-kali-berturut-banyumas-pertahankan-opini-wtp/>)

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka sebuah instansi harus memiliki sistem informasi akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan sebuah bisnis (Krismiahi, 2015). Sistem informasi akuntansi dapat meminimalisir terjadinya salah dalam pencatatan, dan apabila terdapat salah pencatatan akan lebih cepat dalam mengoreksi laporan keuangan. Hasil penelitian dari Setyawan (2018) dan Binaurina (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2016) dan Ningrum (2018) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu sumber daya manusia yang berkompeten. Menurut Andrianto (2017) Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam organisasi dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pegawai yang mempunyai kompetensi sumber daya manusia yang baik maka dengan mudah memahami logika akuntansi dan akan menggunakan pengetahuan dan pemahamannya dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan peraturan yang berlaku sehingga jauh dari kesalahan penyajian. Hasil penelitian dari Septarini (2016) menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil ini sama dengan hasil penelitian dari Andrianto (2017) yang menyatakan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Sanjaya (2017) dan Hasibun (2018) yang menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kualitas laporan keuangan daerah juga ditentukan oleh seberapa baik sistem pengendalian intern yang diterapkan atau dimiliki oleh sebuah instansi tersebut. Menurut Andrianto (2017) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif akan melindungi organisasi dari kelemahan manusia, mengurangi kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi, sehingga informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Hasil penelitian dari Yeni (2016) dan Maksyur (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian oleh Cahyandari (2017) dan Septarini (2016) yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi membahas mengenai hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) dalam bentuk kontrak kerjasama. Agen dikontrak untuk melaksanakan dan mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan.

2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang memberikan informasi kepada pihak lain (*stakeholder*), dimana informasi tersebut digunakan oleh *stakeholder* sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan bermanfaat untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas, realisasi

anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga akan menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk entitas tersebut dan akan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya tersebut.

Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.1.3. Sistem Informasi Akuntansi

Sebuah jaringan prosedur yang dibuat sesuai dengan pola yang terpadu guna melaksanakan sebuah kegiatan pokok dalam sebuah perusahaan disebut dengan sistem. Sistem akuntansi yaitu organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan dalam mengelola perusahaan (Mulyadi, 2008). Sistem yang terdapat dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan yang diperlukan disebut juga dengan sistem informasi (Halim, 1995). Romney dan Paul (2004) mendefinisikan sistem informasi akuntansi merupakan serangkaian dari satu atau lebih komponen yang saling berelasi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, yang terdiri dari pelaku, serangkaian prosedur, dan teknologi informasi.

2.1.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia yaitu kapabilitas seorang individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi – fungsinya dalam mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien (Triwahyuni, 2016).

Agar kompetensi setiap individu dapat berkembang dan meningkat kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian maka perlu diberikan suatu pelatihan dan pembinaan kinerja yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan. Kompetensi sumber daya manusia diharapkan dapat memberi nilai tambah terhadap organisasi melalui berbagai keahlian, keterampilan dan gagasan yang inovatif. Dengan demikian pengelolaan sumber daya manusia harus di kelola dengan sebaik-baiknya agar dapat berkontribusi dengan maksimal sehingga mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kepentingan masyarakat.

2.1.5. Sistem Pengendalian Intern

Menurut Undang-Undang No 60 Tahun 2008 mengenai sistem pengendalian internal yaitu suatu proses yang pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) menyebutkan ada lima komponen kontrol internal: Lingkungan kontrol, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan kegiatan pemantauan.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa berdasarkan pada teori agensi, akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Salah satu pertanggungjawaban dikatakan baik apabila berkualitas, salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah salah satunya adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi.

H₁: Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan pertanggung jawaban organisasi sektor publik dalam bentuk laporan keuangan merupakan salah satu konsep yang berdasarkan teori keagenan (Rosalin, 2011). Hubungan antar pihak pemerintah dengan pengguna informasi keuangan pemerintah merupakan suatu hubungan keagenan. Pemerintah daerah selaku agen memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan bermanfaat kepada para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam meniali akuntabilitas.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Maksyur, 2015). Sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki kecakapan pengetahuan di bidang akuntansi maka akan dengan mudah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan sebaliknya apabila sumber daya manusia tidak memadai maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

H₂: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai agen atau penerima tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya maka berkewajiban untuk melayani masyarakat dengan penuh dedikasi. Akan tetapi disamping memberikan pelayanan yang optimal, agen dipaksa untuk mengungkapkan akuntabilitasnya melalui laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu organisasi diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem pengendalian intern yaitu proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Andrianto, 2017).

Tercapainya sebuah sistem pengendalian intern yang efektif dalam sebuah organisasi melalui diterapkannya pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, adanya pengendalian fisik terhadap aset dan catatan keuangan organisasi, dan pengawasan terkait dengan pengelolaan keuangan maka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku. Standar yang dimaksud yaitu terpenuhinya karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Jika suatu organisasi tidak memiliki sistem pengendalian intern yang

baik sebagai pedoman dalam mengontrol dan mengevaluasi kinerja organisasi, maka kinerja yang dihasilkan tidak optimal yang diwujudkan dengan laporan keuangan yang tidak berkualitas.

H₃: Pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan Objek Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Objek dalam penelitian ini adalah persepsi pegawai subbagian keuangan SKPD Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi aspek pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai subbagian keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen serta Kabupaten Banyumas. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan sampling purposive yaitu dengan kriteria kepala subbagian keuangan dan staf keuangan di SKPD Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas.

3.3. Pengukuran Variabel

3.3.1. Variabel Independen

1. Sistem informasi akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan dan pembuatan keputusan yang relevan kepada pihak luar perusahaan (seperti kantor pajak, investor, dan kreditor) dan pihak intern (terutama manajemen) (Moscove, 1981 dalam Halim, 1995). indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Sistem informasi akuntansi, yaitu:

- a. Sumber daya manusia.
- b. Alat.
- c. Data.
- d. Informasi.

Indikator-indikator tersebut kemudian diukur menggunakan Skala *Likert* 5 poin.

2. Kompetensi sumber daya manusia

Kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau kelembagaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kompetensi sumber daya manusia, yaitu:

- a. Pendidikan
- b. Pelatihan
- c. Pengalaman
- d. Tanggungjawab

Indikator-indikator tersebut kemudian diukur menggunakan Skala *Likert* 5 poin.

3. Sistem pengendalian intern

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sistem penegndlian intern, yaitu:

- a. Lingkungan kontrol
- b. Penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Kegiatan pemantauan

Indikator-indikator tersebut kemudian diukur menggunakan Skala *Likert* 5 poin.

3.3.2. Variabel Dependen

Kualitas laporan keuangan yaitu tingkat efektivitas kemampuan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga mudah untuk dipahami, dan bermanfaat oleh pemakainya dalam pengambilan keputusan, terbebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga dapat dibandingkan dengan periode – periode sebelumnya, indikator untuk mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Indikator-indikator tersebut kemudian diukur menggunakan Skala *Likert* 5 poin.

3.4. Teknik Analisis Data

3.4.1. Uji Validitas dan uji reabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi uji validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2009). Hasil r hitung kita bandingkan dengan r tabel dimana $df = n-2$ dengan sig 5% jika r tabel $< r$ hitung maka valid.

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil. Jadi, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator atau kuesioner yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel (Ghozali, 2009).

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Histogram Standardized Regression Residual dan Kolmogorov-Smirnov (K-S) digunakan untuk mendeteksi uji normalitas. Jika Histogram Standardized Regression Residual membentuk kurva seperti lonceng maka nilai residual tersebut dinyatakan normal. Data dikatakan normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$ (Andrianto, 2017).

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Husein Umar, 2011:177). Jika adanya korelasi maka mengandung multikolinearitas yang harus ditangani. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas antar variabel di model regresi salah satu cara untuk mendeteksi yaitu dengan melihat nilai TOL (Tolerance) dan Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Apabila dalam suatu penelitian besarnya nilai $VIF \leq 10$ dan nilai Tolerance $\geq 0,10$ menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian tersebut (Imam Ghozali, 2011:106).

Heteroskedastisitas berarti ada varian dari residual pada model regresi yang tidak sama. Jika varian dari residual pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homokedastisitas. Model regresi yang diharapkan adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Dalam penelitian ini digunakan uji Spearman's Rho.. Gejala heteroskedastisitas akan ditunjukkan oleh koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap nilai absolut residunya (e), jika nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai alpha (Sig. > (0,05), maka dapat dipastikan model tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ (Suliyanto, 2011).

3.4.3. Analisis regresi linier berganda

Analisa regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).

Uji F (Goodness Of Fit) Uji t

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (goodness of fit) (Suliyanto, 2011).

Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel (Suliyanto, 2011).

Metode suksesif interval (MSI)

Metode suksesif interval adalah sebuah metode transformasi data ordinal menjadi data interval dengan mengubah proporsi kumulatif setiap peubah pada kategori menjadi nilai kurva normal bakunya (Ningsih & Dukalang, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai subbagian keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Kebumen serta Kabupaten Banyumas. Setiap kabupaten diambil 17 satuan kerja perangkat daerah sehingga

jumlah seluruh satuan kerja perangkat daerah berjumlah 34. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan sampling purposive yaitu dengan kriteria kepala subbagian keuangan dan staf keuangan di SKPD Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas. Sampel penelitian ini berjumlah 102 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden dalam jangka waktu tiga minggu. Kuesioner yang dibagikan kepada reponden berjumlah 102 kuesioner. Penelitian ini unit analisisnya adalah unit organisasi sehingga unit sampelnya hanya berjumlah 34.

Tabel 4.1 Daftar Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	102
2	Kuesioner yang tidak kembali	0
3	Kuesioner yang dapat diolah	102
<i>Response rate</i>		100%

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2021).

4.2. Analisis Data

4.2.1. Uji Validitas dan Reabilitas

Analisis data untuk pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan SPSS. Nilai r_{tabel} dapat diperoleh menggunakan *degree of freedom* disebut juga dengan derajat kebebasan dengan tingkat probabilitas sebesar 5%. Derajat kebebasan diperoleh menggunakan rumus $n-2$, dimana n merupakan jumlah responden. Penelitian ini terdapat jumlah responden (n) yaitu 34 responden, sehingga diperoleh besarnya df adalah 32 dan nilai derajat kebebasan dengan tingkat probabilitas 5% maka diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,3388. Berikut adalah hasil uji validasi yang dilakukan menggunakan SPSS versi 25.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Akuntansi

No	Corrected Item-Total Correlation	r_{tabel}	Keterangan
1	.412**	0,3388	Valid
2	.601**	0,3388	Valid
3	.877**	0,3388	Valid
4	.814**	0,3388	Valid
5	.826**	0,3388	Valid
6	.843**	0,3388	Valid
7	.669**	0,3388	Valid

Sumber : Penelitian yang diolah

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Corrected Item-Total Correlation	r_{tabel}	Keterangan
1	.537**	0,3388	Valid
2	.372**	0,3388	Valid
3	.786**	0,3388	Valid
4	.774**	0,3388	Valid
5	.833**	0,3388	Valid

Sumber : Penelitian yang diolah

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern

No	Corrected Item-Total Correlation	r_{tabel}	Keterangan
1	.353**	0,3388	Valid
2	.641**	0,3388	Valid
3	.757**	0,3388	Valid
4	.832**	0,3388	Valid
5	.759**	0,3388	Valid
6	.793**	0,3388	Valid
7	.698**	0,3388	Valid

Sumber : Penelitian yang diolah

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No	Corrected Item-Total Correlation	r_{tabel}	Keterangan
1	.484**	0,3388	Valid
2	.533**	0,3388	Valid
3	.833**	0,3388	Valid
4	.715**	0,3388	Valid
5	.858**	0,3388	Valid
6	.753**	0,3388	Valid
7	.854**	0,3388	Valid
8	.805**	0,3388	Valid
9	.893**	0,3388	Valid
10	.743**	0,3388	Valid

Sumber : Penelitian yang diolah

Dapat disimpulkan bahwa nilai r_{hitung} yang diperoleh dari keseluruhan pertanyaan variabel sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih besar dari r_{tabel} sehingga item dari seluruh pertanyaan dapat dinyatakan valid.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas pada variabel sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan menggunakan SPSS versi 25

Tabel 4.10 Hasil Uji Realiabilitas

No.	Variabel	Koefisien <i>cronbach alpha</i>	<i>Cronbach alpha min.</i>	Keterangan
1	Sistem Informasi Akuntansi	0,852	>0,60	Reliabel
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,699	>0,60	Reliabel
3	Pengendalian Intern	0,824	>0,60	Reliabel

4	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,914	>0,60	Reliabel
---	---	-------	-------	----------

Sumber : Penelitian yang diolah

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai koefisien *Cronbach Alpha* > 0,6. Hal tersebut berarti bahwa pertanyaan di dalam kuesioner bersifat reliabel.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Pada teori normalitas menjabarkan bahwa saat nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* > 0,05 maka data dinyatakan terdistribusi secara normal. Hasil tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,200 > 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Dibawah ini adalah hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan SPSS versi 25.

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas data

One-Sample kolmogorov- Smirnov Tes		
		Unstandardized Residual
	N	34
Normal Parameters ^a	Mean	0,0000000
	Std.Deviation	1,67808236
Most Extreme Differences	Absolute	0,122
	Positive	0,122
	Negative	-0,114
	Kolmogorov-Smirnov Z	0,122
	Asymp.Sig.(2-tailed)	,200

a. Test distributionis Normal
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction
 d. This is a lower bound of the true

Sumber : Hasil Olah SPSS

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang biasa digunakan untuk mengetahui apakah terdapat koreasi antar variabel independen. Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 25

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas

No.	Variabel Bebas	Nilai VIF	tolerance	Keterangan
1	Sistem Informasi Akuntansi (X ₁)	2,329	0,429	Bebas multikolinieritas
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₂)	3,968	0,252	Bebas multikolinieritas

3	Pengendalian Intern (X ₃)	5,667	0,176	Bebas multikolinearitas
---	---------------------------------------	-------	-------	-------------------------

Sumber : Penelitian yang diolah

Berdasarkan hasil tabel 4.12 memperlihatkan bahwa nilai VIF ketiga variabel yang diujikan <10, dan nilai T (*tolerance*) >0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas atau korelasi antar variabel independen.

Uji Heterokedasitas

Berikut merupakan hasil uji uji heterokedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25.

Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas

No.	Variabel Bebas	Sig.	Keterangan
1	Sistem Informasi Akuntansi (X ₁)	0,268	Bebas Heteroskedastisitas
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₂)	0,835	Bebas Heteroskedastisitas
3	Pengendalian Intern (X ₃)	0,493	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Penelitian yang diolah

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi ketiga variabel independen > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat permasalahan heterokedasitas didalam model regresi. Uji heterokedasitas ini dilakukan dengan menggunakan uji koefisiensi korelasi *Spearman's Rho*.

4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji Asumsi klasik yang hasilnya menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam model penelitian ini berdistribusi normal, bebas dari multikolinieritas dan heteroskedasitas. Dengan demikian, analisis regresi linier berganda sudah dapat dilakukan. Berikut ini merupakan hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25

Tabel 4.14 Hasil uji analisis regresi linier berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constan)	-2,707	2,849		-0,950	0,350
Sistem Informasi Akuntansi	0,783	0,180	0,527	4,353	0,000
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,977	0,381	0,405	2,562	0,016

Pengendalian Intern	0,112	0,308	0,069	0,365	0,717
<u>Dependent Variabel: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</u>					
<i>Sumber : Hasil olah SPSS</i>					

Berdasarkan tabel 4.14 mengenai hasil analisis regresi linier berganda, maka dapat dilihat bahwa rumus regresi dari penelitian ini yaitu;

$$Y = -2,707 + 0,783X_1 + 0,977X_2 + 0,112X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- X₁ : Sistem Informasi Akuntansi
- X₂ : Kompetensi sumber daya manusia
- X₃ : Pengendalian intern
- e : Error

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,793 atau 79,3%. Nilai *adjusted R square* merupakan nilai koefisien determinasi. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat diartikan bahwa variabel sistem informasi akuntansi, variabel kompetensi sumber daya manusia, dan variabel pengendalian intern mampu menjelaskan variasi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 79,3%, sisanya sebesar 20,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Berikut ini adalah hasil koefisien determinasi yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25;

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	,901 ^a	0,811	0,793	1,75999

a. Predicators: (Constant),Pengendalian Intern,Sistem
 Dependent Vaiabel: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Hasil olah SPSS

Uji F (Goodness Of Fit)

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat jika nilai signifikan < 0,05. Hal tersebut berarti bahwa model regresi bersifat signifikan dan bisa digunakan untuk prediksi atau peramalan. Serta terdapat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut ini merupakan hasil dari uji F yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25;

Tabel 4.16 Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	399,917	3	133,206	43,036	,000 ^a
	Residual	92,927	30	3,098		

Total	492,844	33
a. Dependent Variabel: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah		
b. Predicators: (Constans),Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi		

Sumber : Hasil olah SPSS

Uji t

Nilai t_{tabel} dapat dicari dengan menggunakan *degree of freedom* atau derajat kebebasan dengan tingkat probabilitasnya sebesar 5%. Penelitian ini memiliki 34 unit analisis. Derajat kebebasan diperoleh menggunakan rumus yaitu $n - k$, dengan n merupakan jumlah responden dan k adalah jumlah keseluruhan variabel dalam penelitian. Sehingga diperoleh nilai derajat kebebasan sebesar 30. Berdasarkan nilai derajat kebebasan dengan tingkat probabilitas 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} senilai 1,697. Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji analisis regresi bergand, maka dapat diperoleh hasil pengujian hipotesis.

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil tabel t menunjukkan bahwa hipotesis variabel sistem informasi akuntansi menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 4,353 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Suatu hipotesis dikatakan diterima jika nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} dengan nilai signifikansinya $< 0,05$. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diterima.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil tabel t menunjukkan bahwa hipotesis variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 2,562 dan nilai signifikansinya sebesar 0,016. Suatu hipotesis dikatakan diterima jika nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} dengan nilai signifikansinya $< 0,05$. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diterima.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil tabel t menunjukkan bahwa hipotesis variabel pengendalian intern menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 0,365 dan nilai signifikansinya sebesar 0,717. Suatu hipotesis dikatakan diterima jika nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} dengan nilai signifikansinya $< 0,05$. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, ditolak.

4.3. Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji dari hipotesis pertama dinyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu variabel dalam penelitian yang membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pesatnya perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh organisasi sektor publik untuk memajukan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta dalam menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sari (2016) dan Yeny (2016) mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji dari hipotesis kedua dinyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam menyusun laporan keuangan karena dasar tercapainya kinerja yang maksimal yaitu kompetensi yang di miliki oleh pegawainya. Pelatihan dan pembinaan kinerja yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan sumber daya manusia dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian seorang individu. Keahlian, keterampilan dan gagasan yang inovatif yang dimiliki oleh seorang individu memberikan nilai tambah terhadap organisasi pemerintah itu sendiri, dan dapat berkontribusi dengan maksimal sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Cahyandari (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji dari hipotesis ketiga dinyatakan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena sistem pengendalian intern yang baik apabila tidak diterapkan secara efektif akan menimbulkan banyak ketidaksesuaian antara proses yang berjalan dengan peraturan yang berlaku, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan kurang baik. Hal lain yang memungkinkan terjadinya pengendalian intern di tolak karena pengendalian intern belum diterapkan dengan maksimal yaitu semua pemimpin SKPD belum melakukan pemeriksaan untuk catatan akuntansi secara maksimal (Latifah, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Septarini (2016), Gumelar (2017) dan Cahyandari (2017) memiliki hasil sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Evicahyani (2016), Utama (2017) dan Susilarti (2018) memiliki hasil sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah..

4. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

4.1. Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel sistem informasi akuntansi, variabel kompetensi sumber daya manusia, variabel pengendalian intern, dan variabel norma subjektif dalam pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut berarti pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut berarti kemampuan dan pemahaman akan akuntansi yang dimiliki oleh pegawai maka akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

3. Pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut berarti pengendalian intern yang efektif dalam sebuah organisasi apabila tidak ditetapkan secara efektif dapat mempengaruhi menurunnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, berikut adalah implikasi penelitian terkait variabel sistem informasi akuntansi, variabel kompetensi sumber daya manusia, dan variabel pengendalian intern dalam pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu :

1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi akuntansi sudah dimanfaatkan secara maksimal dalam membantu penyusunan dan pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga mempermudah dan menghemat waktu pengguna akan pekerjaan mereka, apabila terdapat kesalahan dalam pencatatan akan mudah terdeteksi dan diperbaiki. Sehingga setiap tahunnya pemerintah daerah perlu meningkatkan atau memperbaharui sistem yang setiap tahun pastinya ada perbaikan dan pembaharuan sistem agar dapat menunjang pegawai dalam penyusunan dan pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki kecakapan pengetahuan di bidang akuntansi akan dengan mudah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Dengan demikian sumber daya manusia perlu diberikan pelatihan secara berkala untuk menunjang kemampuannya dibidang akuntansi.
3. Berkaitan dengan pelaporan keuangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan motivasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

4.3. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penyebaran kuesioner mengalami beberapa kendala seperti kuesioner yang telah disebar di beberapa dinas di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas hilang atau terselip sehingga harus memberikan kuesioner yang baru dengan demikian memerlukan waktu tambahan dalam memproses data. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan jumlah kuesioner dari jumlah yang seharusnya, sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga.
2. Dalam penelitian ini unit penelitiannya yaitu unit organisasi dengan jumlah 34 organisasi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, memungkinkan terjadinya bias dalam hasil penelitian karena jumlah kuesioner yang diolah kurang dari jumlah yang seharusnya. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbanyak organisasi pemerintah daerah agar terhindar dari hasil penelitian yang bias.

4.4. Saran

1. Penelitian ini dilakukan pada OPD di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas yang kualitas laporannya sudah baik sehingga data yang diperoleh kurang menggambarkan pengaruh variabel – variabel independen terhadap variabel dependen secara lebih luas. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang membandingkan antara kabupaten yang memiliki kualitas

laporan keuangan yang sudah baik dengan kabupaten yang masih memiliki kualitas laporan keuangan yang kurang baik.

2. Pada penelitian ini, uji koefisien determinasi sebesar 57,5% artinya variabel independen hanya mampu menjelaskan sebesar 57,5% variabel dependen. Sebesar 42,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengungkapkan yang belum bisa dijelaskan pada penelitian ini dan dapat menambahkan variabel-variabel lain seperti komite organisasi dan lingkungan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Sistem Berbasis Akrua, Ti, Dan Spip Pada Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi . E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol.2, 3475-3500.
- Andrianto, E., & Rahmawati, D. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Fakultas Ekonomi.
- Arifah, D. A. (2012). Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. Jurnal Prestasi, Vol.9, 85-95.
- Cahyandari, A. D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Sukoharjo). Electronic Theses and Dissertations.
- COSO Internal Control-Integrated Framework An Implementation Guide for the Healthcare Provider Industry. (2019). Durham: Crowe.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan . E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol.5.3, 403-428.
- Gumelar, A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kerinci).
- Ghozali, I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardyansyah, & Khalid, A. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada Skpd Kabupaten Polewali Mandar. JurnalIlmiah Akuntansi Peradaban, Vol 1.
- Julita, Susilatri. (2018). Analysis Of Factor Affecting The Quality Of Government Financial Report Bengkalis Regency. Jurnal Intenational Journal Of Scientific And Technology Research, Vol. 7., 157-168.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2006). Peraturan Pemerintah Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PP Nomor 08 Tahun 2006). Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2010). Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi pemerintahan (Nomor 71 Tahun 2010). Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2010). Peraturan Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Nomor 65 Tahun 2010). Jakarta: Kemenkeu.

- Karsana, I. W., & Suaryana, I. N. (2017). Pengaruh Efektivitas Penerapan Sap, Kompetensi Sdm, Dan Spi Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.21, 643-670.
- Kiranayanti, I. A., & Erawati, N. M. (2016, Agustus). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.16.2, 1290 - 1318.
- Latifah,A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntans.Universitas PGRI Yogyakarta.
- Maksyur, N. V. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan . JOM.FEKON, Vol.2.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Modo, S. M., & Saerang, D. P. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill", Vol.7.
- Ningsih, S., & Dukalang, H. (2019). Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analsis Regresi. Jambura Journal of Mathematics, 43-53.
- Pamungkas, V. P. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali) . Electronic Theses and Dissertation.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Peovinsi DIY. Jurnal Nominal, Vol.VI.
- Rahmah, K., & Zulkifli. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Berbasis AkruaI Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul (Studi Empiris pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul DIY). Jurnal Kajian Bisnis, Vol.26, 113-130.
- Sari, N. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Ka. JOM Fekom, Vol.3, 1478-1490.
- Sanjaya, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan,Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangandaerah, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar). JOM Fekom, Vol.4, 366-380.
- Septarini, D. F., & Papilaya, F. (2016). Interaksi Komite Organisasi Terhadap Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Ekonomi & Sosial, Vol.VII, 100-116.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. KINERJA, Vol 20, 179-191.
- Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Journal Of Accounting Science, Vol. 2, 2548 - 3501.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Metode Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

- Setiawan , S. A. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Mediasi.
- Sudiarianti, N. M., Agung Ulupui, I. K., & Budiasih, I. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi.
- Suliyanto. (2011). Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sujarweni, W. (2015). Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suliyanto. (2018). Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Yogyakarta: Andi.
- Triwahyuni, M. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintahan Daerah Kota Dumai). JOM Fekon, Vol. 3.
- Udiyanti, N. N., Atmadja, A. T., & Darmawan, N. A. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.2.
- Utama, R. J. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). JOM Fekom, Vol 4, No 1, 1429-1443.
- Yeny, Karamoy, H., & Poputra, A. T. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Jurnal EMBA, Vol.4, 682-694.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Bisnis & Ekonomi, 56-64.
- _____. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- _____. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- _____. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Warren, S. Carl., and Reeve, M. James., and Fess, E. Philip. 2005. Corporate Financial Accounting. South Western: Thomson.